



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/KEPMEN-KP/2018
TENTANG
RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta dalam rangka perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka menyelaraskan peraturan dan kebijakan yang berlaku serta terjadinya perubahan kondisi lingkungan atau administratif wilayah yang mengakibatkan perubahan kebijakan pelabuhan perikanan dan rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional, perlu menetapkan kembali Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional yang memuat Kebijakan Pelabuhan Perikanan Nasional dan Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan.
- KETIGA : Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, kecuali terjadi perubahan kebijakan, kondisi lingkungan, atau bencana.
- KEEMPAT : Kode, nama, dan lokasi pelabuhan perikanan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini menjadi acuan dalam sistem perizinan, statistik perikanan, dan sistem pendataan lain yang terkait.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2018

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/KEPMEN-KP/2018
TENTANG
RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN
NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 2,55 juta km²) dan memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah. Anugerah tersebut dapat dijadikan sebagai modal strategis bagi pembangunan ekonomi nasional dengan reorientasi paradigma pembangunan dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan, melalui perwujudan bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan maritim, dengan menempatkan maritim sebagai poros kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dilakukan untuk mendorong perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah dengan didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan RPJPN tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan rencana pembangunan kelautan dan perikanan dengan visi yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”.

Pelabuhan perikanan pada awalnya berfungsi sebagai tempat beraktivitas yang aman bagi nelayan dan kapal perikanan. Fungsi awal tersebut selanjutnya menyebabkan pertumbuhan konsentrasi nelayan dan kapal perikanan. Kemudian diikuti dengan aktivitas terkait lainnya seperti pembangunan dan perbaikan kapal, serta pemasaran produk perikanan. Beranjak dari aktivitas dasar tersebut, keberadaan pelabuhan perikanan mulai tumbuh berkembang menjadi suatu prasarana yang berfungsi untuk menunjang aktivitas kelautan dan perikanan dalam pemanfaatan dan

pengelolaan sumber daya ikan mulai dari kegiatan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, pemasaran ikan, dan pengawasan sumber daya ikan. Sehingga dalam perkembangannya pelabuhan perikanan menjadi suatu prasarana penunjang yang memiliki fungsi-fungsi strategis mencakup fungsi pemerintahan dan fungsi pengusaha yang mempunyai dampak pengganda terhadap pengembangan perekonomian wilayah berupa peningkatan nilai tambah, efisiensi, produktivitas usaha perikanan tangkap, dan penyerapan tenaga kerja selain itu dapat menjadi tonggak dalam mempertahankan kedaulatan dan pertahanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Apabila kedua fungsi tersebut sudah berjalan dengan baik, maka pelabuhan perikanan akan berdaya guna sebagai pusat aktivitas industrialisasi kelautan perikanan yang tentunya akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik dan pengentasan kemiskinan.

Untuk mewujudkan pelabuhan perikanan yang dapat menunjang aktivitas perikanan diperlukan suatu pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan yang terencana, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan badan usaha milik negara dan/atau swasta, dengan memperhatikan daya dukung sumber daya ikan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Untuk memberikan landasan yang kuat dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan, perlu menyusun Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

B. Tujuan dan Sasaran

Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional ditetapkan dengan

tujuan sebagai acuan atau pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara, dan/atau swasta dalam menyelenggarakan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan agar dapat saling mendukung antara satu dan lainnya.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional adalah terwujudnya kepatuhan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara dan/atau swasta dalam pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam pengelolaan perikanan.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional mencakup kebijakan pelabuhan perikanan nasional dan rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional.

D. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
2. Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPPN, adalah pengaturan ruang Pelabuhan Perikanan nasional yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan Perikanan, rencana lokasi Pelabuhan Perikanan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan.
3. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan.

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

KEBIJAKAN PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, menempatkan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dengan mengembangkan keunggulan kompetitif perekonomian daerah yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, serta penyediaan infrastruktur sebagai strateginya.

Berpedoman pada landasan perencanaan tersebut, untuk menjamin pencapaian dan sekaligus menjaga konsistensi arah pembangunan nasional, diperlukan suatu capaian yang menjadi tujuan jangka panjang pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan, yaitu “Mewujudkan Pelabuhan Perikanan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah” yang selaras dengan rencana penataan ruang wilayah, ketersediaan Sumber Daya Ikan dan sumber daya manusianya, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Untuk memudahkan tercapainya tujuan jangka panjang pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan tersebut, diperlukan arah kebijakan dalam pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan, serta tahapan dan strategi dalam pencapaiannya.

A. Arah Kebijakan Pembangunan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Dalam RPJMN disebutkan bahwa arah kebijakan umum pembangunan nasional terkait bidang kelautan dan perikanan difokuskan pada upaya:

1. Pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
3. Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional tersebut,

maka kebijakan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam rangka mendukung pembangunan nasional lebih arahkan untuk:

1. menyediakan pelayanan dasar masyarakat dalam rangka penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan;
2. pemerataan pembangunan/pengembangan daerah melalui percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan;
3. efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur dan lebih diarahkan untuk berorientasi pada pemangku kepentingan;
4. mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
5. membangun konektivitas/jejaring antarPelabuhan Perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan Ikan;
6. meningkatkan daya saing produk dan nilai tambah hasil perikanan melalui penumbuhan industri; dan
7. sinergitas dalam pembangunan/pengembangan Pelabuhan Perikanan.

B. Tahapan Umum dan Strategi Pembangunan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Saat ini Pelabuhan Perikanan memiliki beragam kondisi, fasilitas, operasional, maupun penyebaran di wilayah Indonesia. Ditinjau dari sudut pandang penyebaran, sebagian besar atau sebanyak 69% (enam puluh sembilan) persen Pelabuhan Perikanan berada di wilayah Indonesia bagian barat dan sebagian kecil atau sebanyak 31% (tiga puluh satu) persen Pelabuhan Perikanan berada di wilayah Indonesia bagian timur. Kondisi penyebaran ini bertolak belakang dengan fakta geografis dan keberadaan potensi Sumber Daya Ikan, dimana luasan laut dan potensi Sumber Daya Ikan yang relatif lebih luas dan banyak berada di wilayah Indonesia bagian timur.

Ditinjau dari fungsi pemasaran dan distribusi Ikan, beberapa Pelabuhan Perikanan tersebut juga belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dan berjalan secara sinergis. Dengan total produksi yang mencapai hampir 5 (lima) juta ton per tahun seharusnya menjadikan produk perikanan Indonesia dalam posisi tawar yang kuat, namun pada kenyataannya masih dirasakan rendahnya daya saing produk perikanan tangkap Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya, yang disebabkan oleh

permasalahan mutu dan mahal nya biaya distribusi. Selain itu, Pelabuhan Perikanan membutuhkan keterpaduan secara regional dalam menjalankan fungsi dan perannya, apakah sebagai pelabuhan yang berperan sebagai penyedia produk primer, atau pelabuhan yang berperan menjalankan fasilitasi pemasaran secara regional, sehingga tercipta media koneksi yang efektif untuk mendistribusikan hasil tangkapan Ikan, maupun sebagai pelabuhan yang mampu membangun nilai tambah produk perikanan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan permasalahan pelabuhan yang tidak operasional, terjadinya kelebihan atau kekurangan pasokan Ikan di suatu wilayah dan rendahnya nilai produk perikanan dapat diatasi.

Untuk memudahkan tercapainya tujuan jangka panjang dalam pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan, maka diperlukan suatu konsep perencanaan berupa pentahapan umum dalam RIPPN dengan jangka waktu 2018-2037 dengan strategi yang menguatkan setiap pentahapannya yang bertolak dari capaian dan potensi saat ini serta tantangan yang sedang dan akan dihadapi sebagaimana tercantum pada Gambar di bawah ini:



Gambar: Pentahapan Umum dalam RIPPN 2018-2037

Pada Gambar tersebut terlihat pentahapan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tahap-I

Pelaksanaan Tahap-I berupa penyediaan layanan dasar Pelabuhan Perikanan merupakan tahap yang diarahkan untuk membangun fondasi operasionalitas Pelabuhan Perikanan dan diharapkan pada tahap ini Pelabuhan Perikanan dapat operasional. Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan pada Tahap-I diharapkan mampu melaksanakan peran sebagai penyedia produk primer. Dengan demikian strategi pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan pada tahap ini lebih difokuskan pada:

- a. penyediaan dokumen perencanaan (studi kelayakan, rencana induk Pelabuhan Perikanan, dan desain rinci);
- b. pembangunan fasilitas yang harus ada (minimum operasional) pada Pelabuhan Perikanan;
- c. penyediaan dan penetapan lembaga/sumber daya manusia pengelola;
- d. pelaksanaan fungsi perusahaan (pelayanan tambat labuh kapal perikanan, bongkar muat Ikan, kegiatan operasional kapal perikanan, pemasaran, dan distribusi produk perikanan);
- e. pelaksanaan kesyahbandaran;
- f. pelaksanaan pengendalian Sumber Daya Ikan; dan
- g. pelaksanaan pendataan.

2. Tahap-II

Pelaksanaan Tahap-II berupa penumbuhan ekonomi jejaring, merupakan tahap yang diarahkan agar penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan dapat saling mendukung antara satu dan lainnya guna menjamin ketersediaan pasokan Ikan. Penumbuhan ekonomi jejaring dilakukan bagi Pelabuhan Perikanan yang pada kondisinya telah dapat menyediakan layanan dasar Pelabuhan Perikanan dan operasional sebagaimana pada Tahap-I. Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan pada Tahap-II diharapkan mampu berperan menjalankan fasilitasi pemasaran secara regional. Dengan demikian strategi pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan pada tahap ini lebih difokuskan pada:

- a. pengembangan fasilitas untuk mendukung pemasaran regional;
- b. peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta dalam kegiatan sistem bisnis perikanan;
- c. pembangunan/pengembangan sistem teknologi informasi antar-Pelabuhan Perikanan;
- d. pemanfaatan konektivitas seperti jaringan transportasi nasional dan

sistem logistik ikan nasional dalam mendukung pemasaran dan distribusi produk perikanan;

- e. pelaksanaan ketertelusuran hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan; dan
- f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan.

3. Tahap-III

Pelaksanaan Tahap-III berupa penumbuhan ekonomi industri merupakan tahap yang diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa pasar baru serta meningkatkan nilai tambah, sehingga memicu dampak penggandanya. Penumbuhan ekonomi industri dilakukan pada Pelabuhan Perikanan yang pada kondisinya telah dapat menyediakan layanan dasar Pelabuhan Perikanan sehingga operasional dan mendukung ketersediaan pasokan ikan antar-Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Tahap-I dan Tahap-II. Pelabuhan perikanan yang dikembangkan pada Tahap-III diharapkan berperan hingga mampu membangun nilai tambah produk perikanan dalam skala industri. Dengan demikian, strategi pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan pada tahap ini lebih difokuskan pada:

- a. pengembangan fasilitas untuk mendukung ekonomi industri;
- b. pemenuhan standar mutu produk perikanan;
- c. penerapan prinsip Pelabuhan Perikanan yang berwawasan lingkungan dalam operasional Pelabuhan Perikanan;
- d. pelaksanaan industrialisasi perikanan yang berbasis pada peningkatan kualitas produk perikanan di Pelabuhan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan karantina ikan.

BAB III

RENCANA LOKASI PELABUHAN PERIKANAN

A. Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan Nasional

Dalam merencanakan Pelabuhan Perikanan di Indonesia perlu

diperhatikan faktor kecukupan dan faktor konektivitas antar-Pelabuhan Perikanan.

1. Faktor Kecukupan

Faktor kecukupan ini dibutuhkan untuk mengetahui jumlah kebutuhan Pelabuhan Perikanan di Indonesia. Suatu Pelabuhan Perikanan disebut cukup apabila:

- a. secara kuantitas dan kapasitas mampu memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran; dan
- b. secara kualitas memenuhi persyaratan/kriteria teknis dan operasional sesuai dengan kelasnya serta dapat menjalankan fungsi kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang Kepelabuhan Perikanan.

Dalam skala nasional, idealnya Pelabuhan Perikanan yang ada di Indonesia dapat dikatakan mencukupi apabila kapasitas layanan total Pelabuhan Perikanan mampu melayani seluruh kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang direpresentasikan dengan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB). Untuk mendapatkan jumlah maksimum Pelabuhan Perikanan yang bisa dikembangkan di Indonesia, maka dapat dihitung melalui pembagian angka JTB dengan kapasitas minimum operasional Pelabuhan Perikanan.

Perhitungan jumlah kebutuhan Pelabuhan Perikanan yang didasarkan pada jumlah JTB dan kriteria minimal operasional yang tertera pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang Kepelabuhanan Perikanan, akan menghasilkan gambaran maksimum Pelabuhan Perikanan yang dapat dibangun di Indonesia.

2. Faktor Konektivitas

Konektivitas/jejaring sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan menjamin kelancaran arus/distribusi produk perikanan antarwilayah di Indonesia.

Konsep konektivitas Pelabuhan Perikanan direncanakan dengan pendekatan wilayah provinsi. Secara nasional, diharapkan 1 (satu) Pelabuhan Perikanan yang berperan pada Tahap-III, yang akan di dukung oleh minimal 2 (dua) Pelabuhan Perikanan yang berperan pada Tahap-II, dan setiap 1 (satu) Pelabuhan Perikanan Tahap-II, akan didukung oleh minimal 2 (dua) Pelabuhan Perikanan yang berperan pada Tahap-I, dengan

mempertimbangkan kondisi wilayah dan Sumber Daya Ikan.

Selanjutnya dalam hal pemilihan titik lokasi Pelabuhan Perikanan, perlu dipertimbangkan:

1. Rencana Zonasi dan Rencana Tata Ruang

Penyusunan rencana lokasi mempertimbangkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan rencana lokasi yang digunakan adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Nasional, mengingat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum seluruhnya diimplementasikan/disusun oleh Pemerintah Daerah.

2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Potensi Sumber Daya Ikan

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mencakup perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI dibagi ke dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan, namun belum mencakup wilayah pengelolaan perikanan di perairan darat. Untuk perairan darat hingga saat ini masih merupakan satu kesatuan wilayah pengelolaan perikanan, yang apabila mengacu pada FAO Statistical Area, untuk wilayah perairan darat menggunakan kode numerik 04.

Potensi atau ketersediaan Sumber Daya Ikan di suatu perairan menjadi pertimbangan utama pembangunan atau pengembangan Pelabuhan Perikanan. Potensi Sumber Daya Ikan menentukan kapasitas penangkapan atau jumlah kapal perikanan pada suatu perairan dan pada akhirnya menentukan kapasitas Pelabuhan Perikanan yang dibangun atau dikembangkan untuk melayaninya.

Besaran potensi Sumber Daya Ikan pada saat ini mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Adapun lokasi WPPNRI dan potensi Sumber Daya Ikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. WPPNRI 571, meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
- b. WPPNRI 572, meliputi perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
- c. WPPNRI 573, meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat;
- d. WPPNRI 711, meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;
- e. WPPNRI 712, meliputi perairan Laut Jawa;
- f. WPPNRI 713, meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
- g. WPPNRI 714, meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
- h. WPPNRI 715, meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
- i. WPPNRI 716, meliputi perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera;
- j. WPPNRI 717, meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik; dan
- k. WPPNRI 718, meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor Bagian Timur.

Estimasi Potensi, JTB, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Potensi, JTB dan Tingkat Pemanfaatan di WPPNRI

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia			Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar*	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Penaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi- cumi	Jumlah
Selat Malaka dan Laut Andaman	WPPNRI 571	Potensi (ton)	99.865	64.444	145.495	20.030	59.455	673	12.829	13.614	9.038	425.444
		JTB (ton)	79.892	51.556	116.396	16.024	47.564	539	10.263	10.891	7.230	-
		Tingkat pemanfaatan	0,83	0,52	0,33	0,34	1,59	1,30	1,00	0,93	0,62	-
Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda	WPPNRI 572	Potensi (ton)	527.029	276.755	362.005	40.570	8.023	1.483	9.543	989	14.579	1.240.975
		JTB (ton)	421.623	221.404	289.604	32.456	6.418	1.186	7.634	791	11.663	-
		Tingkat pemanfaatan	0,50	0,95	0,57	0,33	1,53	0,93	0,18	0,49	0,39	-
		Potensi (ton)	630.521	586.128	7.902	22.045	7.340	970	526	3.913	8.195	1.267.540
Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusatenggara, Laut Savu, dan Laut Timor Bagian Barat	WPPNRI 573	JTB (ton)	504.417	468.902	6.322	17.636	5.872	776	421	3.130	6.556	-
		Tingkat pemanfaatan	1,50	1,06	0,39	1,09	1,70	0,61	0,28	0,98	1,11	-
Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan	WPPNRI 711	Potensi (ton)	330.284	185.855	131.070	20.625	62.342	1.421	2.318	9.711	23.499	767.126
		JTB (ton)	264.227	148.684	104.856	16.500	49.873	1.137	1.854	7.769	18.799	-
		Tingkat pemanfaatan	1,41	0,93	0,61	1,53	0,53	0,54	1,09	1,18	1,84	-
Perairan Laut Jawa	WPPNRI 712	Potensi (ton)	364.663	72.812	657.525	29.951	57.965	989	7.664	23.508	126.554	1.341.632
		JTB (ton)	291.730	58.250	526.020	23.961	46.372	791	6.131	18.806	101.244	-
		Tingkat pemanfaatan	0,38	0,63	0,83	1,22	1,11	1,36	0,70	0,65	2,02	-
Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali	WPPNRI 713	Potensi (ton)	208.414	645.058	252.869	19.856	30.404	927	4.347	5.463	10.519	1.177.857
		JTB (ton)	166.731	516.046	202.295	15.885	24.324	742	3.477	4.370	8.415	-
		Tingkat pemanfaatan	1,23	1,13	0,96	1,27	0,52	1,40	0,83	0,73	1,19	-
Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda	WPPNRI 714	Potensi (ton)	165.944	304.293	98.010	145.530	3.180	724	1.145	1.669	68.444	788.939
		JTB (ton)	132.755	243.435	78.408	116.424	2.544	579	916	1.335	54.755	-
		Tingkat pemanfaatan	0,44	0,78	0,58	0,76	0,39	1,73	1,55	0,77	1,00	-
Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau	WPPNRI 715	Potensi (ton)	555.982	31.659	325.080	310.866	6.436	846	891	495	10.272	1.242.526
		JTB (ton)	444.786	25.327	260.064	248.693	5.149	677	712	396	8.217	-
		Tingkat pemanfaatan	0,88	0,97	0,22	0,34	0,78	1,32	1,19	0,98	1,86	-
Perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera	WPPNRI 716	Potensi (ton)	332.635	181.491	36.142	34.440	7.945	894	2.196	294	1.103	597.139
		JTB (ton)	266.108	145.193	28.914	27.552	6.356	715	1.756	235	883	-
		Tingkat pemanfaatan	0,48	0,63	0,45	1,45	0,50	0,75	0,38	0,50	1,42	-
Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik	WPPNRI 717	Potensi (ton)	829.188	65.935	131.675	15.016	9.150	1.044	489	58	2.140	1.054.695
		JTB (ton)	663.350	52.748	105.340	12.013	7.320	835	391	46	1.712	-
		Tingkat pemanfaatan	0,70	1,00	0,39	0,91	0,46	1,04	0,87	1,21	1,09	-
Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur	WPPNRI 718	Potensi (ton)	836.973	818.870	876.722	29.485	62.842	1.187	1.498	775	9.212	2.637.565
		JTB (ton)	669.579	655.096	701.378	23.588	50.274	950	1.198	620	7.370	-
		Tingkat pemanfaatan	0,51	0,99	0,67	1,07	0,86	0,97	0,85	0,77	1,28	-
Jumlah Potensi (ton)												12.541.438

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

3. Daya Dukung Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mewujudkan pentahapan pembangunan Pelabuhan Perikanan, dibutuhkan dukungan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perikanan, kesyahbandaran, pelayanan kepelabuhan perikanan, teknologi informasi serta keterlibatan nelayan, dan pelaku usaha dalam menumbuhkan industri perikanan di Pelabuhan Perikanan.

4. Dukungan Prasarana Wilayah

Dalam pembangunan Pelabuhan Perikanan dibutuhkan adanya dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah setempat terkait dengan prasarana wilayah yang harus ada sebelumnya, antara lain fasilitas pokok/utama seperti jalan, jembatan, gedung/bangunan dan sebagainya, serta fasilitas fungsional dan penunjang yang terkait langsung dengan Pelabuhan Perikanan seperti listrik, air bersih, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dengan adanya dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah setempat terkait dengan prasarana wilayah akan mempermudah dan mempercepat pembangunan atau pengembangan Pelabuhan Perikanan.

5. Geografis Daerah dan Kondisi Perairan

Kondisi geografis daerah, antara lain kondisi lahan, kerentanan terhadap bencana, dan jarak akses terhadap pasar. Sedangkan, kondisi perairan mencakup, antara lain batimetri perairan, tinggi gelombang, pasang surut, kecepatan arus, ruang gerak kapal, dan sedimentasi.

6. Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat mencakup, antara lain keberadaan nelayan, profitabilitas usaha nelayan, pendapatan perkapita penduduk, potensi konflik, dan hambatan sosial.

B. Jangka Waktu RIPPN

Jangka waktu RIPPN ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan, kondisi lingkungan, atau bencana, RIPPN dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

C. Rencana Titik Lokasi Pelabuhan Perikanan

Rencana titik lokasi Pelabuhan Perikanan yang tercantum dalam RIPPN yaitu:

1. 538 (lima ratus tiga puluh delapan) lokasi Pelabuhan Perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah laut dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 2; dan
2. 54 (lima puluh empat) lokasi Pelabuhan Perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan darat dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel.2 Rencana Titik Lokasi Pelabuhan Perikanan yang Melayani Kapal Perikanan yang Melakukan Kegiatan Perikanan di Wilayah Laut

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
11	Provinsi Aceh						
571.11.1	Ie Meulee	Aceh	Kota Sabang	1	1	1	1
571.11.2	Keuneukai	Aceh	Kota Sabang	1	1	1	1
571.11.3	Lambada	Aceh	Kab. Aceh Besar	1	1	1	1
571.11.4	Kuala Tari	Aceh	Kab. Pidie	1	1	1	1
571.11.5	Kuala Gigieng	Aceh	Kab. Pidie	1	2	2	2
571.11.6	Kuala Peukan Baro	Aceh	Kab. Pidie	1	2	2	2
571.11.7	Mereudu	Aceh	Kab. Pidie Jaya	2	2	2	2
571.11.8	Pante Raja	Aceh	Kab. Pidie Jaya	2	2	2	2
571.11.9	Kuala Jangka	Aceh	Kab. Bireuen	1	2	2	2
571.11.10	Peudada	Aceh	Kab. Bireuen	2	2	2	2
571.11.11	Pusong	Aceh	Kota Lhokseumawe	2	2	2	2
571.11.12	Ujung Blang	Aceh	Kota Lhokseumawe	2	2	2	2
571.11.13	Krueng Mane	Aceh	Kab. Aceh Utara	2	2	2	2
571.11.14	Kuala Cangkoy	Aceh	Kab. Aceh Utara	1	2	2	2
571.11.15	Blang Mee	Aceh	Kab. Aceh Utara	1	1	1	1
571.11.16	Seuneubok Baroh	Aceh	Kab. Aceh Timur	2	2	2	2
571.11.17	Idi	Aceh	Kab. Aceh Timur	2	3	3	3
571.11.18	Kuala Langsa	Aceh	Kota Langsa	2	2	2	2
572.11.19	Lampulo	Aceh	Kota Banda Aceh	2	3	3	3
572.11.20	Ulee Lheue	Aceh	Kota Banda Aceh	1	1	1	1
572.11.21	Lhok Seudu	Aceh	Kab. Aceh Besar	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
572.11.22	Calang	Aceh	Kab. Aceh Jaya	1	1	1	2
572.11.23	Ujong Baroeh	Aceh	Kab. Aceh Barat	2	2	2	2
572.11.24	Kuala Tadu	Aceh	Kab. Nagan Raya	1	1	1	1
572.11.25	Kuala Tuha	Aceh	Kab. Nagan Raya	1	1	1	1
572.11.26	Ujung Serangga	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	2	2	2	2
572.11.27	Keude Meukek	Aceh	Kab. Aceh Selatan	2	2	2	2
572.11.28	Lhok Bengkuang	Aceh	Kab. Aceh Selatan	1	2	2	2
572.11.29	Labuhanhaji	Aceh	Kab. Aceh Selatan	1	1	1	2
572.11.30	Sawang Ba'u	Aceh	Kab. Aceh Selatan	2	2	2	2
572.11.31	Teluk Sinabang	Aceh	Kab. Simeulue	1	1	2	2
12	Provinsi Sumatera Utara						
571.12.1	Pangkalan Susu	Sumatera Utara	Kab. Langkat	1	1	1	1
571.12.2	Bagan Deli	Sumatera Utara	Kota Medan	1	1	1	1
571.12.3	Belawan	Sumatera Utara	Kota Medan	2	3	3	3
571.12.4	Bagan Percut	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	1	1	1	1
571.12.5	Pantai Labu	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	1	1	1	1
571.12.6	Tanjung Beringin	Sumatera Utara	Kab. Serdang Badagai	1	1	1	1
571.12.7	Bagan Asahan Baru	Sumatera Utara	Kab. Asahan	1	1	1	1
571.12.8	Tanjung Balai Asahan	Sumatera Utara	Kab. Asahan	1	1	1	2
571.12.9	Tanjung Leidong	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu Utara	1	1	1	1
571.12.10	Sei Berombang	Sumatera Utara	Kab. Labuhan Batu	1	1	1	1
571.12.11	Tanjung Tiram	Sumatera Utara	Kab. Batu Bara	1	1	1	2
572.12.12	Pulo Tello	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	1	1	1	2
572.12.13	Sibolga	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	1	2	2	3

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
572.12.14	Sorkam	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	1	2	2	2
13	Provinsi Sumatera Barat						
572.13.1	Aia Bangih	Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	2	2	2	2
572.13.2	Sasak	Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	1	1	1	1
572.13.3	Tiku	Sumatera Barat	Kab. Agam	2	2	2	2
572.13.4	Bungus	Sumatera Barat	Kota Padang	1	2	2	2
572.13.5	Muara Anai	Sumatera Barat	Kota Padang	1	2	2	2
572.13.6	Sikakap	Sumatera Barat	Kab. Kep. Mentawai	1	1	1	2
572.13.7	Carocok	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	2	2	3	3
572.13.8	Pasar Kambang	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	2	2	2	2
14	Provinsi Riau						
571.14.1	Dumai	Riau	Kota Dumai	1	2	2	2
571.14.2	Tanjung Samak	Riau	Kab. Kep. Meranti	1	1	1	1
711.14.3	Sungai Guntung	Riau	Kab. Indragiri Hilir	1	1	1	1
15	Provinsi Jambi						
711.15.1	Kuala Tungkal	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	1	2	2
711.15.2	Nipah Panjang	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	1	2	2
711.15.3	Teluk Majelis	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	1	1	1
16	Provinsi Sumatera Selatan						
711.16.1	Jakabaring	Sumatera Selatan	Kota Palembang	2	2	2	3
711.16.2	Sungai Lumpur	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	1	1	1	1
711.16.3	Sungsang	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	1	1	2	2

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
17	Provinsi Bengkulu						
572.17.1	Pasar Bantal	Bengkulu	Kab. Muko Muko	1	1	1	1
572.17.2	Air Napal	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	1	1	2	2
572.17.3	Pulau Baai	Bengkulu	Kota Bengkulu	1	2	2	3
572.17.4	Pondok Kelapa	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	1	1	2	2
572.17.5	Muara Maras	Bengkulu	Kab. Seluma	1	2	2	2
572.17.6	Pasar Bawah/Manna	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	1	1	1	1
572.17.7	Pasar Lama	Bengkulu	Kab. Kaur	1	1	1	1
18	Provinsi Lampung						
572.18.1	Badak	Lampung	Kab. Tanggamus	1	1	1	1
572.18.2	Guring	Lampung	Kab. Tanggamus	1	1	1	1
572.18.3	Karanganyar	Lampung	Kab. Tanggamus	1	1	1	1
572.18.4	Kota Agung	Lampung	Kab. Tanggamus	1	1	2	2
572.18.5	Penyandingan	Lampung	Kab. Tanggamus	1	1	1	1
572.18.6	Putih Doh	Lampung	Kab. Tanggamus	1	1	1	1
572.18.7	Tegineneng	Lampung	Kab. Tanggamus	1	1	1	1
572.18.8	Kalianda	Lampung	Kab. Lampung Selatan	1	1	2	2
572.18.9	Ketapang	Lampung	Kab. Lampung Selatan	1	1	1	1
572.18.10	Kramat	Lampung	Kab. Lampung Selatan	1	1	1	1
572.18.11	Kunjir	Lampung	Kab. Lampung Selatan	1	1	1	1
572.18.12	Muara Piluk Bakauheni	Lampung	Kab. Lampung Selatan	1	1	1	1
572.18.13	Rangai	Lampung	Kab. Lampung Selatan	1	1	1	1
572.18.14	Way Muli	Lampung	Kab. Lampung Selatan	1	1	1	1
572.18.15	Lempasing	Lampung	Kota Bandar Lampung	1	1	2	3
572.18.16	Bengkunat	Lampung	Kab. Pesisir Barat	1	1	2	2
572.18.17	Kuala Stabas	Lampung	Kab. Pesisir Barat	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
572.18.18	Durian	Lampung	Kab. Pesawaran	1	1	1	1
712.18.19	Teladas	Lampung	Kab. Tulang Bawang	1	1	1	1
712.18.20	Cabang	Lampung	Kab. Lampung Tengah	1	1	1	1
712.18.21	Kuala Penet	Lampung	Kab. Lampung Timur	1	1	1	1
712.18.22	Labuhan Maringgai	Lampung	Kab. Lampung Timur	1	1	2	3
19	Provinsi Kep. Bangka Belitung						
711.19.1	Muara Sungai Baturusa	Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	1	1	1	2
711.19.2	Sungailiat	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	2	2	3	3
711.19.3	Batu Belubang	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	1	1	1	1
711.19.4	Kurau	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	1	1	1	1
711.19.5	Sungai Selan	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	2	2	2	2
711.19.6	Sadai	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	2	3	3	3
711.19.7	Selat Nasik	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	1	1	1	1
711.19.8	Tanjung Pandan	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	2	2	3	3
711.19.9	Gantung	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	2	2	2	2
711.19.10	Manggar	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	2	2	2	2
21	Provinsi Kepulauan Riau						
711.21.1	Tanjung Balai Karimun	Kep. Riau	Kab. Karimun	2	2	2	2
711.21.2	Tarempa	Kep. Riau	Kab. Kep. Anambas	1	1	2	3
711.21.3	Bunguran Barat	Kep. Riau	Kab. Natuna	1	1	1	1
711.21.4	Selat Lampa	Kep. Riau	Kab. Natuna	1	1	1	1
711.21.5	Kijang	Kep. Riau	Kab. Bintan	1	1	1	1
711.21.6	Moro	Kep. Riau	Kab. Karimun	1	1	1	1
711.21.7	Barelang	Kep. Riau	Kota Batam	1	1	1	1
711.21.8	Telaga Punggur	Kep. Riau	Kota Batam	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
711.21.9	Dompak	Kep. Riau	Kota Tanjung Pinang	1	1	1	1
31	Provinsi DKI Jakarta						
712.31.1	Pulau Pramuka	DKI Jakarta	Kab. Kepulauan Seribu	1	1	1	1
712.31.2	Cilincing	DKI Jakarta	Jakarta Utara	1	1	1	1
712.31.3	Kalibaru	DKI Jakarta	Jakarta Utara	1	1	1	1
712.31.4	Kamal Muara	DKI Jakarta	Jakarta Utara	1	1	1	1
712.31.5	Muara Angke	DKI Jakarta	Jakarta Utara	2	3	3	3
712.31.6	Nizam Zachman Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta Utara	3	3	3	3
32	Provinsi Jawa Barat						
573.32.1	Cibangban	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	1	2	2	2
573.32.2	Cisolok	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	1	2	2	2
573.32.3	Ciwaru	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	1	1	1	1
573.32.4	Mina Jaya	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	1	1	1	1
573.32.5	Palabuhan Ratu	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	2	3	3	3
573.32.6	Ujung Genteng	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	1	1	1	1
573.32.7	Jayanti	Jawa Barat	Kab. Cianjur	1	1	1	1
573.32.8	Cijeruk	Jawa Barat	Kab. Garut	1	1	1	1
573.32.9	Cilauteureun	Jawa Barat	Kab. Garut	1	2	2	2
573.32.10	Cimari Muara	Jawa Barat	Kab. Garut	1	1	1	1
573.32.11	Ranca Buaya	Jawa Barat	Kab. Garut	1	1	1	1
573.32.12	Nusa Cimanuk	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	1	1	1	2
573.32.13	Pamayang Sari	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	1	1	1	2
573.32.14	Batu Karas	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	1	1	1	1
573.32.15	Bojong Selawe	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	1	1	1	1
573.32.16	Cikidang	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	1	1	2	2
573.32.17	Legok Jawa	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
573.32.18	Madasari	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	1	1	1	1
573.32.19	Majingklak	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	1	1	1	1
712.32.20	Muara Bendera	Jawa Barat	Kab. Bekasi	1	1	1	1
712.32.21	Muara Jaya	Jawa Barat	Kab. Bekasi	1	1	1	1
712.32.22	Pal Jaya	Jawa Barat	Kab. Bekasi	1	2	2	2
712.32.23	Cemara	Jawa Barat	Kab. Karawang	1	1	1	1
712.32.24	Ciparage	Jawa Barat	Kab. Karawang	1	1	1	2
712.32.25	Muara	Jawa Barat	Kab. Karawang	1	1	1	1
712.32.26	Pasir Putih	Jawa Barat	Kab. Karawang	1	1	1	1
712.32.27	Sungai Buntu	Jawa Barat	Kab. Karawang	1	1	1	1
712.32.28	Tambaksari	Jawa Barat	Kab. Karawang	1	1	1	1
712.32.29	Tangkolak	Jawa Barat	Kab. Karawang	1	1	1	1
712.32.30	Pakisjaya	Jawa Barat	Kab. Karawang	1	1	1	1
712.32.31	Blanakan	Jawa Barat	Kab. Subang	1	2	2	2
712.32.32	Cilamaya Girang	Jawa Barat	Kab. Subang	1	1	1	1
712.32.33	Genteng	Jawa Barat	Kab. Subang	1	1	1	1
712.32.34	Mayangan (Subang)	Jawa Barat	Kab. Subang	1	1	1	1
712.32.35	Muara Ciasem	Jawa Barat	Kab. Subang	1	1	2	2
712.32.36	Rawameneng	Jawa Barat	Kab. Subang	1	1	1	1
712.32.37	Cangkring	Jawa Barat	Kab. Indramayu	1	1	1	1
712.32.38	Dadap	Jawa Barat	Kab. Indramayu	1	1	1	2
712.32.39	Eretan Wetan	Jawa Barat	Kab. Indramayu	2	2	2	2
712.32.40	Juntinyuat	Jawa Barat	Kab. Indramayu	1	1	1	1
712.32.41	Karangsong	Jawa Barat	Kab. Indramayu	2	2	2	2
712.32.42	Sukahaji/Bugel	Jawa Barat	Kab. Indramayu	1	1	1	1
712.32.43	Ambulu	Jawa Barat	Kab. Cirebon	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
712.32.44	Bandengan	Jawa Barat	Kab. Cirebon	1	1	1	1
712.32.45	Bondet	Jawa Barat	Kab. Cirebon	1	1	1	1
712.32.46	Bungko	Jawa Barat	Kab. Cirebon	2	2	2	2
712.32.47	Bungko Lor	Jawa Barat	Kab. Cirebon	1	1	1	1
712.32.48	Citemu	Jawa Barat	Kab. Cirebon	1	1	1	1
712.32.49	Ender	Jawa Barat	Kab. Cirebon	1	1	1	1
712.32.50	Gebang Mekar	Jawa Barat	Kab. Cirebon	2	2	2	2
712.32.51	Karang Reja	Jawa Barat	Kab. Cirebon	1	1	1	1
712.32.52	Waru Duwur	Jawa Barat	Kab. Cirebon	1	1	1	1
712.32.53	Cangkol	Jawa Barat	Kota Cirebon	1	1	1	1
712.32.54	Kasenden	Jawa Barat	Kota Cirebon	1	1	1	1
712.32.55	Kejawanan	Jawa Barat	Kota Cirebon	2	2	2	2
712.32.56	Pesisir	Jawa Barat	Kota Cirebon	1	1	1	1
33	Provinsi Jawa Tengah						
573.33.1	Cilacap	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	2	3	3	3
573.33.2	Jetis	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1	1	1	1
573.33.3	Kemiren	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1	1	1	1
573.33.4	Lengkong	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1	1	1	1
573.33.5	Sentolo Kambang	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1	1	1	1
573.33.6	Sentolo Kawat	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	1	1	1	1
573.33.7	Karang Duwur	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	1	1	1	1
573.33.8	Logending	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	1	1	1	2
573.33.9	Pasir	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	1	1	1	1
573.33.10	Tanggulangun	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	1	1	1	1
573.33.11	Jati Kontal	Jawa Tengah	Kab. Purworejo	1	1	1	1
573.33.12	Kaburuhan	Jawa Tengah	Kab. Purworejo	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
712.33.13	Kaliwlingi	Jawa Tengah	Kab. Brebes	1	2	2	2
712.33.14	Kluwut	Jawa Tengah	Kab. Brebes	1	2	2	2
712.33.15	Krakahan	Jawa Tengah	Kab. Brebes	1	1	1	1
712.33.16	Prapag Kidul	Jawa Tengah	Kab. Brebes	1	1	1	1
712.33.17	Pulolampes	Jawa Tengah	Kab. Brebes	1	1	1	1
712.33.18	Kota Tegal	Jawa Tengah	Kota Tegal	1	1	1	1
712.33.19	Tegalsari	Jawa Tengah	Kota Tegal	2	2	2	2
712.33.20	Larangan	Jawa Tengah	Kab. Tegal	1	1	1	2
712.33.21	Surodadi	Jawa Tengah	Kab. Tegal	1	1	1	1
712.33.22	Asemdayong	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	2	2	2	2
712.33.23	Mojo	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	1	1	1	1
712.33.24	Tanjungsari	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	2	2	2	2
712.33.25	Tasik Rejo	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	1	1	1	1
712.33.26	Pekalongan	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	2	3	3	3
712.33.27	Jambean	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	1	1	1	1
712.33.28	Wonokerto	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	2	2	2	2
712.33.29	Celong	Jawa Tengah	Kab. Batang	1	1	1	1
712.33.30	Klidang Lor	Jawa Tengah	Kab. Batang	2	2	2	2
712.33.31	Roban	Jawa Tengah	Kab. Batang	1	1	1	1
712.33.32	Bandengan	Jawa Tengah	Kab. Kendal	1	1	1	1
712.33.33	Sendang Sikucing	Jawa Tengah	Kab. Kendal	1	2	2	2
712.33.34	Tawang	Jawa Tengah	Kab. Kendal	1	2	2	2
712.33.35	Tambak Lorok	Jawa Tengah	Kota Semarang	1	1	1	1
712.33.36	Morodemak	Jawa Tengah	Kab. Demak	1	1	1	2
712.33.37	Wedung	Jawa Tengah	Kab. Demak	1	1	1	1
712.33.38	Bandungharjo	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1	2	2	2

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
712.33.39	Bondo	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1	1	1	1
712.33.40	Bulu	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1	1	1	1
712.33.41	Demaan	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1	1	1	1
712.33.42	Jobokuto	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1	2	2	2
712.33.43	Karimunjawa	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1	1	1	1
712.33.44	Kedungmalang	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1	1	1	1
712.33.45	Mlonggo	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1	1	1	1
712.33.46	Panggung	Jawa Tengah	Kab. Jepara	1	1	1	1
712.33.47	Bajomulyo	Jawa Tengah	Kab. Pati	2	2	2	2
712.33.48	Banyutowo	Jawa Tengah	Kab. Pati	1	1	1	1
712.33.49	Pecangan	Jawa Tengah	Kab. Pati	1	1	1	1
712.33.50	Puncel	Jawa Tengah	Kab. Pati	1	1	1	1
712.33.51	Sambiroto	Jawa Tengah	Kab. Pati	1	1	1	1
712.33.52	Karanganyar	Jawa Tengah	Kab. Rembang	1	1	1	1
712.33.53	Pandangan	Jawa Tengah	Kab. Rembang	1	1	1	1
712.33.54	Pangkalan	Jawa Tengah	Kab. Rembang	1	1	1	1
712.33.55	Sarang	Jawa Tengah	Kab. Rembang	2	2	2	2
712.33.56	Tanjung Sari	Jawa Tengah	Kab. Rembang	2	2	2	2
712.33.57	Tasik Agung	Jawa Tengah	Kab. Rembang	2	2	3	3
34	Provinsi DI Yogyakarta						
573.34.1	Tanjung Adikarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	1	1	2	3
573.34.2	Pandan Simo	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kab. Bantul	1	1	1	1
573.34.3	Sadeng	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	1	2	2	3

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
35	Provinsi Jawa Timur						
573.35.1	Sumberrejo	Jawa Timur	Kab. Pacitan	1	1	1	1
573.35.2	Tamperan	Jawa Timur	Kab. Pacitan	2	2	2	2
573.35.3	Tawang	Jawa Timur	Kab. Pacitan	1	1	1	1
573.35.4	Watukarung	Jawa Timur	Kab. Pacitan	1	1	1	1
573.35.5	Wawaran	Jawa Timur	Kab. Pacitan	1	1	1	1
573.35.6	Blado	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	1	1	1	1
573.35.7	Joketro	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	1	1	1	1
573.35.8	Ngadipuro	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	1	1	1	1
573.35.9	Prigi	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	2	2	3	3
573.35.10	Popoh	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	1	2	2	2
573.35.11	Sine	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	1	1	1	1
573.35.12	Tambakrejo	Jawa Timur	Kab. Blitar	1	2	2	2
573.35.13	Pondok Dadap	Jawa Timur	Kab. Malang	1	2	2	2
573.35.14	Selok Awar-awar	Jawa Timur	Kab. Lumajang	1	1	1	1
573.35.15	Dampar	Jawa Timur	Kab. Lumajang	1	1	1	1
573.35.16	Tegalrejo	Jawa Timur	Kab. Lumajang	1	1	1	1
573.35.17	Wotgalih	Jawa Timur	Kab. Lumajang	1	1	1	1
573.35.18	Jeni	Jawa Timur	Kab. Jember	1	1	1	1
573.35.19	Paseban	Jawa Timur	Kab. Jember	1	1	1	1
573.35.20	Puger	Jawa Timur	Kab. Jember	2	2	2	2
573.35.21	Watu Ulo	Jawa Timur	Kab. Jember	1	1	1	1
573.35.22	Watulimo	Jawa Timur	Kab. Jember	1	1	1	1
573.35.23	Blimbing Sari	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	1	1	1	1
573.35.24	Grajagan	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	2	2	2	2
573.35.25	Kampung Mandar	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
573.35.26	Muncar	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	2	3	3	3
573.35.27	Pancer	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	2	2	2	2
573.35.28	Bimorejo	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	1	1	1	1
573.35.29	Badean	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	1	1	1	1
573.35.30	Satelit	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	1	1	1	1
573.35.31	Brak Kalimoro	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	1	1	1	1
573.35.32	Krajan Bomo	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	1	1	1	1
573.35.33	Watu Kebo	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	1	1	1	1
573.35.34	Pacemengan	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	1	1	1	1
573.35.35	Alas Bulu	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	1	1	1	1
573.35.36	Kedonen	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	1	1	1	1
573.35.37	Kaliwatu	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	1	1	1	1
712.35.38	Bulu	Jawa Timur	Kab. Tuban	1	1	1	2
712.35.39	Glondonggede	Jawa Timur	Kab. Tuban	1	1	1	1
712.35.40	Kaliuntu / Kalibuntu	Jawa Timur	Kab. Tuban	1	1	1	1
712.35.41	Karang Agung	Jawa Timur	Kab. Tuban	1	1	1	1
712.35.42	Palang	Jawa Timur	Kab. Tuban	1	2	2	2
712.35.43	Brondong	Jawa Timur	Kab. Lamongan	2	2	3	3
712.35.44	Kranji	Jawa Timur	Kab. Lamongan	1	1	1	1
712.35.45	Labuhan	Jawa Timur	Kab. Lamongan	1	1	1	1
712.35.46	Lohgung	Jawa Timur	Kab. Lamongan	1	1	1	1
712.35.47	Paciran	Jawa Timur	Kab. Lamongan	1	1	1	2
712.35.48	Weru Komplek	Jawa Timur	Kab. Lamongan	1	1	1	1
712.35.49	Bawean	Jawa Timur	Kab. Gresik	1	2	2	2
712.35.50	Campurejo	Jawa Timur	Kab. Gresik	1	1	1	1
712.35.51	Paceng	Jawa Timur	Kab. Gresik	2	2	2	2

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
712.35.52	Banyusangkah	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	1	1	1	1
712.35.53	Camplong	Jawa Timur	Kab. Sampang	1	2	2	2
712.35.54	Ketapang	Jawa Timur	Kab. Sampang	2	2	2	2
712.35.55	Branta Pasisir	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	1	1	1	1
712.35.56	Ambunten	Jawa Timur	Kab. Sumenep	2	2	2	2
712.35.57	Arjasa	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1	1	1	1
712.35.58	Batang-batang	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1	1	1	1
712.35.59	Bluto	Jawa Timur	Kab. Sumenep	2	2	2	2
712.35.60	Dungkek	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1	1	1	1
712.35.61	Gapura	Jawa Timur	Kab. Sumenep	2	2	2	2
712.35.62	Gayam	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1	1	1	1
712.35.63	Masalembu	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1	1	1	1
712.35.64	Pasongsongan	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1	2	2	2
712.35.65	Pragaan	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1	1	1	1
712.35.66	Raas	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1	1	1	1
712.35.67	Sapeken	Jawa Timur	Kab. Sumenep	1	1	1	1
712.35.68	Balong Dowo	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	1	1	1	1
712.35.69	Banjar Kemuning	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	1	1	1	1
712.35.70	Bluru	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	1	1	1	1
712.35.71	Juanda	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	1	1	1	1
712.35.72	Lekok	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	1	1	1	2
712.35.73	Ngemplakrejo	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	1	1	1	1
712.35.74	Ketapang	Jawa Timur	Kota Probolinggo	1	1	1	1
712.35.75	Mayangan	Jawa Timur	Kota Probolinggo	2	2	2	2
712.35.76	Paiton	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	1	2	2	2
712.35.77	Randu Putih	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
712.35.78	Barigaan	Jawa Timur	Kab. Situbondo	1	1	1	1
712.35.79	Besuki	Jawa Timur	Kab. Situbondo	1	2	2	2
712.35.80	Bungatan	Jawa Timur	Kab. Situbondo	1	1	1	1
712.35.81	Jangkar	Jawa Timur	Kab. Situbondo	1	1	1	1
712.35.82	Kalbut	Jawa Timur	Kab. Situbondo	1	1	1	1
712.35.83	Ketah	Jawa Timur	Kab. Situbondo	1	1	1	1
712.35.84	Landangan	Jawa Timur	Kab. Situbondo	1	1	1	1
712.35.85	Panarukan	Jawa Timur	Kab. Situbondo	1	1	1	1
712.35.86	Pandean	Jawa Timur	Kab. Situbondo	1	1	1	1
712.35.87	Pondok Mimbo	Jawa Timur	Kab. Situbondo	1	1	1	1
712.35.88	Somangkaan	Jawa Timur	Kab. Situbondo	1	1	1	1
36	Provinsi Banten						
572.36.1	Cikeusik	Banten	Kab. Pandeglang	1	1	1	1
572.36.2	Labuan	Banten	Kab. Pandeglang	1	1	2	2
572.36.3	Panimbang	Banten	Kab. Pandeglang	1	1	1	1
572.36.4	Sidamukti	Banten	Kab. Pandeglang	1	1	1	1
572.36.5	Sukanagara	Banten	Kab. Pandeglang	1	1	1	1
572.36.6	Sumur	Banten	Kab. Pandeglang	1	1	1	1
572.36.7	Tamanjaya	Banten	Kab. Pandeglang	1	1	1	1
572.36.8	Anyer	Banten	Kab. Serang	1	1	1	1
572.36.9	Lontar	Banten	Kab. Serang	1	1	1	1
572.36.10	Pasauran	Banten	Kab. Serang	1	1	1	1
572.36.11	Pulokali	Banten	Kab. Serang	1	1	1	1
572.36.12	Terate	Banten	Kab. Serang	1	1	1	1
572.36.13	Wadas	Banten	Kab. Serang	1	1	1	1
573.36.14	Binuangen	Banten	Kab. Lebak	1	1	2	2

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
712.36.15	Karangantu	Banten	Kota Serang	1	2	2	3
712.36.16	Cituis	Banten	Kab. Tangerang	1	1	1	2
712.36.17	Kronjo	Banten	Kab. Tangerang	1	1	1	1
712.36.18	Tanjung Pasir	Banten	Kab. Tangerang	1	1	1	1
51	Provinsi Bali						
573.51.1	Pengambengan	Bali	Kab. Jembrana	2	3	3	3
573.51.2	Kedonganan	Bali	Kab. Badung	1	1	2	2
713.51.3	Sangsit	Bali	Kab. Buleleng	2	2	2	2
52	Provinsi Nusa Tenggara Barat						
573.52.1	Teluk Awang	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah	1	1	2	3
573.52.2	Labuhan Haji	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	1	1	2	2
573.52.3	Labuhan Lombok	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	2	2	3	3
573.52.4	Tanjung Luar	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	1	2	2	2
573.52.5	Labuhan Lalar	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1	1	1	1
573.52.6	Labuhan Mapin	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1	1	1	1
573.52.7	Sape	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	1	1	2	2
713.52.8	Labuhan Terata	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1	1	1	1
713.52.9	Teluk Santong	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1	1	1	1
713.52.10	Soro Kempo	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	1	1	2	2
713.52.11	Soroadu	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	2	2	2	2
53	Provinsi Nusa Tenggara Timur						
573.53.1	Aimere	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1	1	1	1
573.53.2	Hukung Lewoleba	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	1	1	1	2
573.53.3	Wonokaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
573.53.4	Tulandale	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	1	1	2	2
573.53.5	Kupang	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	1	2	2	2
573.53.6	Oeba	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	2	2	3	3
573.53.7	Wini	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	1	1	1	1
573.53.8	Atapupu	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	1	1	2	2
573.53.9	Paga	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1	1	1	1
713.53.10	Labuhan Bajo	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	1	2	2	2
713.53.11	Nangamese	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	1	1	1	1
713.53.12	Konge	Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo	1	1	1	1
713.53.13	Ende	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1	1	1	1
713.53.14	Paupanda	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	1	1	1	1
713.53.15	Alok	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	1	1	1	1
713.53.16	Amagarapati	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	1	1	2	3
713.53.17	Amakole Jaya	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	1	1	1	1
713.53.18	Ritaebang	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	1	1	1	1
713.53.19	Kenarilang	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	1	1	1	1
61	Provinsi Kalimantan Barat						
711.61.1	Liku	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	1	1	1	1
711.61.2	Pemangkat	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	2	2	3	3
711.61.3	Selakau	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	1	1	1	1
711.61.4	Temajuk	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	1	1	1	1
711.61.5	Kuala	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	1	1	1	1
711.61.6	Lemukutan	Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	1	1	1	1
711.61.7	Sungai Duri	Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	1	1	1	1
711.61.8	Teluk Suak	Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
711.61.9	Bakau Besar	Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	1	1	1	1
711.61.10	Bakau Kecil	Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	1	1	1	1
711.61.11	Kuala Mempawah	Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	1	1	1	1
711.61.12	Sungai Pinyuh	Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	1	1	1	1
711.61.13	Sungai Jawi	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	1	1	1	1
711.61.14	Betok	Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	1	1	1	1
711.61.15	Sukadana	Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	1	1	1	1
711.61.16	Tanjung Satai	Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	1	1	1	1
711.61.17	Teluk Batang	Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	1	2	2	2
711.61.18	Kendawangan	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	1	1	1	1
711.61.19	Suka Bangun	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	1	1	1	1
711.61.20	Muara Kubu	Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	1	1	1	1
711.61.21	Sungai Kakap	Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	1	1	1	1
711.61.22	Sungai Rengas	Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	1	1	1	2
62	Provinsi Kalimantan Tengah						
712.62.1	Kuala Jelai	Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara	1	1	1	1
712.62.2	Kumai	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	1	1	1	1
712.62.3	Kuala Pembuang	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	1	1	1	1
712.62.4	Ujung Pandaran	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	1	1	1	2
712.62.5	Bahaur	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	1	1	1	1
712.62.6	Bontok/Pasar Beringin	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
63	Provinsi Kalimantan Selatan						
712.63.1	Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	2	2	2	2
713.63.2	Jorong/swarangan	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	1	1	1	1
713.63.3	Muara Kintap	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	2	2	2	3
713.63.4	Batulicin	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	1	1	1	1
713.63.5	Kotabaru	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	1	1	1	2
64	Provinsi Kalimantan Timur						
713.64.1	Api-API	Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara	1	1	1	1
713.64.2	Manggar Baru	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1	2	2	2
713.64.3	Kampung Baru Tengah	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1	2	2	2
713.64.4	Filial Klandasan	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1	1	1	1
713.64.5	Kota Bangun	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	1	1	1	1
713.64.6	Selili	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	2	2	3	3
713.64.7	Tanjung Limau	Kalimantan Timur	Kota Bontang	2	2	2	2
713.64.8	Sangatta	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	1	1	1	1
716.64.9	Sambaliung	Kalimantan Timur	Kab. Berau	1	1	1	2
65	Provinsi Kalimantan Utara						
716.65.1	Sebatik	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	1	1	2	3
716.65.2	Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	2	2	3	3
71	Provinsi Sulawesi Utara						
715.71.1	Belang	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara	1	1	1	1
715.71.2	Jiko	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
715.71.3	Tanjung Sidupa	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	1	1	1
716.71.4	Ulu	Sulawesi Utara	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	1	1	1
716.71.5	Salibabu	Sulawesi Utara	Kab. Kep. Talaud	1	1	2	2
716.71.6	Dagho	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	1	1	2	3
716.71.7	Kema	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	1	1	1	2
716.71.8	Likupang	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	1	1	1	1
716.71.9	Bitung	Sulawesi Utara	Kota Bitung	3	3	3	3
716.71.10	Calaca	Sulawesi Utara	Kota Manado	1	1	1	1
716.71.11	Tumumpa	Sulawesi Utara	Kota Manado	1	1	1	2
716.71.12	Atep Oki	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	1	1	1	1
716.71.13	Amurang	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	2	2	2	2
716.71.14	Bolang Uki	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow	1	1	1	1
716.71.15	Dodepo	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	1	1	2
72	Provinsi Sulawesi Tengah						
713.72.1	Donggala	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	2	3	3	3
713.72.2	Labean	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	1	1	1	1
713.72.3	Oguamas	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	1	1	1	1
714.72.4	Kolonedale	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	1	1	1	1
714.72.5	Bungku	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	1	1	1	1
714.72.6	Mato	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	1	1	1	1
714.72.7	Luwuk	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
714.72.8	Rata	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1	1	1	1
715.72.9	Moutong	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	1	1	1	1
715.72.10	Ogotion	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	1	1	1	1
715.72.11	Bolano	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	1	1	1	1
715.72.12	Paranggi	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	1	1	1	2
715.72.13	Petapa	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	1	1	1	1
715.72.14	Tinombo	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	1	1	1	1
715.72.15	Gebangrejo	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	1	1	1	1
715.72.16	Labuan	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	1	1	1	1
715.72.17	Bahari	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	1	1	1	1
715.72.18	Malenge	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una	1	1	1	1
715.72.19	Pagimana	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	1	1	2	2
716.72.20	Kumalingon	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	1	1	1	2
716.72.21	Ogotua	Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli	1	2	2	3
716.72.22	Tandoleo	Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli	1	1	1	1
73	Provinsi Sulawesi Selatan						
713.73.1	Malili	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	1	1	1	1
713.73.2	Pontap	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	1	1	1	2
713.73.3	Balambang	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	1	1	1	1
713.73.4	Bonepute	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	1	1	1	1
713.73.5	Ulo-Ulo	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	1	1	1	1
713.73.6	Lonrae	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	1	2	2	2
713.73.7	Lappa	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	1	2	2	2
713.73.8	Bonto Bahari Bulukumba	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	1	1	1	2
713.73.9	Birea	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	1	1	1	2

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
713.73.10	Tanrusampe	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	1	1	1	2
713.73.11	Beba	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	1	1	1	2
713.73.12	Borombong	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	1	1	1	1
713.73.13	Paotere	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1	1	1	1
713.73.14	Untia	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1	1	2	3
713.73.15	Bonto Bahari Maros	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	1	1	1	2
713.73.16	Labuang	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	1	1	1	1
713.73.17	Maccinibaji	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene Kepulauan	1	1	1	1
713.73.18	Polejiwa	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	1	1	1	2
713.73.19	Sumpang Binangae	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	1	1	1	1
713.73.20	Cempae	Sulawesi Selatan	Kota Pare Pare	1	1	1	2
713.73.21	Lero	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	1	1	1	2
713.73.22	Benteng/Bonehalang	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	1	1	1	2
713.73.23	Kayuadi	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	1	1	1	1
74	Provinsi Sulawesi Tenggara						
713.74.1	Mangolo	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	1	1	1	1
714.74.2	Kendari	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	3	3	3	3
714.74.3	Sodohoa	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	1	1	1	2
714.74.4	Lasolo	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara	1	1	1	1
714.74.5	Torobulu	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	1	1	1	1
714.74.6	Laino	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	1	1	1	1
714.74.7	Pasarwajo	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	1	1	1	1
714.74.8	Kamaru	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	1	1	1	1
714.74.9	Sampolawa	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan	1	1	2	2

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
714.74.10	Wameo	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	1	1	1	2
75	Provinsi Gorontalo						
715.75.1	Inengo	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	1	1	1	2
715.75.2	Tongo	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	1	1	1	1
715.75.3	Tenda	Gorontalo	Kota Gorontalo	1	2	2	2
715.75.4	Tilamuta	Gorontalo	Kab. Boalemo	1	2	2	2
715.75.5	Wonggarasi Timur	Gorontalo	Kab. Pahuwato	1	1	1	1
716.75.6	Gentuma	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	2	2	2	2
716.75.7	Kwandang	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	2	2	3	3
76	Provinsi Sulawesi Barat						
713.76.1	Kasiwah	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	1	1	2	2
713.76.2	Banggae	Sulawesi Barat	Kab. Majene	1	1	1	1
713.76.3	Palipi	Sulawesi Barat	Kab. Majene	1	1	1	1
713.76.4	Lantora	Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	1	1	2	3
81	Provinsi Maluku						
714.81.1	Masarete	Maluku	Kab. Buru	1	1	1	1
714.81.2	Banda	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1	1	2	2
714.81.3	Leihitu	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1	1	1	1
714.81.4	Masohi	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1	1	1	1
714.81.5	Salahutu	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1	1	1	1
714.81.6	Tehoru	Maluku	Kab. Maluku Tengah	1	1	1	1
714.81.7	Ambon	Maluku	Kota Ambon	2	3	3	3
714.81.8	Eri	Maluku	Kota Ambon	1	1	2	2
714.81.9	Ukurlaran	Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	1	2	2

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
714.81.10	Tamher Timur	Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	1	1	1	1
714.81.11	Tiakur	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	1	1	1	1
714.81.12	Wetar	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	1	1	1	1
714.81.13	Penambungan	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	1	1	1	1
714.81.14	Tual	Maluku	Kota Tual	1	2	2	3
715.81.15	Piru	Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	1	1	1	1
718.81.16	Dobo	Maluku	Kab. Kep. Aru	1	1	2	2
718.81.17	Kalar Kalar	Maluku	Kab. Kep. Aru	1	1	1	1
82	Provinsi Maluku Utara						
715.82.1	Daao Majiko	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	1	1	1	1
715.82.2	Tobelo	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	1	1	2	2
715.82.3	Loloda	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	1	1	1	1
715.82.4	Weda	Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	1	1	1	1
715.82.5	Bacan	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	2	2	2	3
715.82.6	Dufa-Dufa	Maluku Utara	Kota Ternate	1	1	2	2
715.82.7	Ternate	Maluku Utara	Kota Ternate	2	2	3	3
715.82.8	Goto	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	2	2	2	2
91	Provinsi Papua						
717.91.1	Waropen	Papua	Kab. Waropen	1	1	1	1
717.91.2	Fandoi	Papua	Kab. Biak Numfor	1	1	2	3

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
717.91.3	Hamadi	Papua	Kota Jayapura	1	1	2	2
717.91.4	Waiya Depapre	Papua	Kab. Jayapura	1	1	1	1
718.91.5	Omor	Papua	Kab. Asmat	1	1	1	1
718.91.6	Sumuraman	Papua	Kab. Mappi	1	1	1	2
718.91.7	Merauke	Papua	Kab. Merauke	1	2	3	3
718.91.8	Poumako	Papua	Kab. Mimika	1	1	1	1
92	Provinsi Papua Barat						
715.92.1	Katapop	Papua Barat	Kab. Sorong	1	1	1	1
715.92.2	Klademak	Papua Barat	Kota Sorong	2	2	2	2
715.92.3	Sorong	Papua Barat	Kota Sorong	2	3	3	3
715.92.4	Wersar	Papua Barat	Kab. Sorong Selatan	1	1	2	2
715.92.5	Bintuni	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	1	1	1	1
715.92.6	Dulan Pok-pok	Papua Barat	Kab. Fak-Fak	1	1	2	3
715.92.7	Coa Kaimana	Papua Barat	Kab. Kaimana	1	1	2	2
717.92.8	Dotir	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	1	1	1	1
717.92.9	Sanggeng	Papua Barat	Kab. Manokwari	1	2	2	2

Tabel. 3 Rencana Titik Lokasi Pelabuhan Perikanan yang Melayani Kapal Perikanan yang Melakukan Kegiatan Perikanan di Wilayah Perairan Darat

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
11	Provinsi Aceh						
04.11.1	Danau Laut Tawar	Aceh	Kab. Aceh Tengah	1	1	1	1
12	Provinsi Sumatera Utara						
04.12.1	Simbolon Purba	Sumatera Utara	Kab. Samosir	1	1	1	1
13	Provinsi Sumatera Barat						
04.13.1	Danau Singkarak	Sumatera Barat	Kab. Solok	1	1	1	1
04.13.2	Danau Maninjau	Sumatera Barat	Kab. Agam	1	1	1	1
14	Provinsi Riau						
04.14.1	Teratak Buluh	Riau	Kab. Kampar	1	1	1	1
04.14.2	Rengat	Riau	Kab. Indragiri Hulu	1	1	1	1
04.14.3	Kuantan Hilir Seberang	Riau	Kab. Kuantan Singingi	1	1	1	1
04.14.4	Teluk Meranti	Riau	Kab. Pelalawan	1	1	1	1
15	Provinsi Jambi						
04.15.1	Mendalo Laut	Jambi	Kab. Muaro Jambi	1	1	1	1
04.15.2	Danau Teluk Kenali	Jambi	Kota Jambi	1	1	1	1
04.15.3	Danau Kerinci	Jambi	Kab. Kerinci	1	1	1	1
16	Provinsi Sumatera Selatan						
04.16.1	Sekayu	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
04.16.2	Lubuk Lampam	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	1	1	1	1
04.16.3	Pampangan	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	1	1	1	1
04.16.4	Banyuasin	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	1	1	1	1
04.16.5	Palembang	Sumatera Selatan	Kota Palembang	1	1	1	1
18	Provinsi Lampung						
04.18.1	Waduk Batutegi	Lampung	Kab. Tanggamus	1	1	1	1
32	Provinsi Jawa Barat						
04.32.1	Waduk Jatiluhur	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	1	1	1	1
04.32.2	Babakan Garut	Jawa Barat	Kab. Cianjur	1	1	1	1
33	Provinsi Jawa Tengah						
04.33.1	Rawalo	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	1	1	1	1
04.33.2	Rawapening	Jawa Tengah	Kab. Semarang	1	1	1	1
04.33.3	Waduk Wadas Lintang	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	1	1	1	1
04.33.4	Sendang Wonogiri	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	1	1	1	1
04.33.5	Wuryantoro	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	1	1	1	1
04.33.6	Eromoko	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	1	1	1	1
04.33.7	Baturetno	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	1	1	1	1
04.33.8	Nguntoronadi	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	1	1	1	1
04.33.9	Ngadirojo	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	1	1	1	1
04.33.10	Waduk Kedungombo	Jawa Tengah	Kab. Sragen	1	1	1	1
35	Provinsi Jawa Timur						
04.35.1	Bengawan Solo	Jawa Timur	Kab. Bojonegoro	1	1	1	1
04.35.2	Waduk Karangates	Jawa Timur	Kab. Malang	1	1	1	1
52	Provinsi Nusa Tenggara Barat						

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
04.52.1	Waduk Batu Bulan	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	1	1	1	1
61	Provinsi Kalimantan Barat						
04.61.1	Suhaid	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	1	1	1	1
04.61.2	Putussibau	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	1	1	1	1
04.61.3	Jongkong	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	1	1	1	1
04.61.4	Sintang	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	1	1	1	1
62	Provinsi Kalimantan Tengah						
04.62.1	Buntok	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	1	1	1	1
04.62.2	Sungai Katingan	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	1	1	1	1
04.62.3	Danau Sembuluh	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	1	1	1	1
04.62.4	Bulik	Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau	1	1	1	1
63	Provinsi Kalimantan Selatan						
04.63.1	Rawa Danau Bangkai	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	1	1	1
04.63.2	Labuan Amas	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	1	1	1
04.63.3	Rawa Danau Panggang	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	1	1	1	1
64	Provinsi Kalimantan Timur						
04.64.1	Kota Baru	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kertanegara	1	1	1	1
04.64.2	Jempang	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	1	1	1	1
65	Provinsi Kalimantan Utara						
04.65.1	Malinau	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	1	1	1	1
71	Provinsi Sulawesi Utara						
04.71.1	Danau Tondano	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	1	1	1	1

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	RENCANA TAHAPAN PELABUHAN PERIKANAN			
				2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2037
72	Provinsi Sulawesi Tengah						
04.72.1	Tentena Poso	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	1	1	1	1
73	Provinsi Sulawesi Selatan						
04.73.1	Laelo	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	1	1	1	1
04.73.2	Panca Lautang	Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang	1	1	1	1
04.73.3	Marioriawa	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	1	1	1	1
74	Provinsi Sulawesi Tenggara						
04.74.1	Danau Rawa Aopa	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	1	1	1	1
75	Provinsi Gorontalo						
04.75.1	Danau Limboto	Gorontalo	Kab. Gorontalo	1	1	1	1
91	Provinsi Papua						
04.91.1	Danau Sentani	Papua	Kab. Jayapura	1	1	1	1

Berdasarkan titik lokasi pada Tabel 2 dan 3, dapat disampaikan gambaran secara umum jumlah Pelabuhan Perikanan menurut tahapan dan periodisasi sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Pelabuhan Perikanan Menurut Tahapan dan Periodisasi

Periode	TAHAP			TOTAL
	I	II	III	
2018-2022	510	79	3	592
2023-2027	462	114	16	592
2028-2032	418	144	30	592
2033-2037	376	165	51	592

Berdasarkan jumlah Pelabuhan Perikanan pada Tabel 4, dapat disampaikan gambaran secara umum jumlah Pelabuhan Perikanan menurut lokasi, sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Pelabuhan Perikanan Menurut Lokasi

LOKASI	JUMLAH PELABUHAN PERIKANAN
WPPNRI-571	31
WPPNRI-572	62
WPPNRI-573	90
WPPNRI-711	18
WPPNRI-712	184
WPPNRI-713	58
WPPNRI-714	28
WPPNRI-715	35
WPPNRI-716	20
WPPNRI-717	6
WPPNRI-718	6
WPP Perairan Darat	54
Total	592

D. Pembiayaan Pembangunan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan program pembangunan kelautan dan perikanan, pola penganggaran pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan lebih diarahkan untuk berorientasi pada pemangku kepentingan dengan berbasis program prioritas Kementerian/lembaga melalui optimalisasi pembangunan fisik melalui dana APBN/APBD/dana lainnya, fokus penggunaan anggaran untuk operasional Pelabuhan Perikanan, efisien dan efektif dalam penentuan kegiatan, serta sinergi pendanaan antara Kementerian dengan kementerian/ lembaga terkait.

BAB IV
PENUTUP

RIPPN merupakan salah satu dasar pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan, yang mencakup kebijakan pelabuhan perikanan nasional dan rencana lokasi pelabuhan perikanan di seluruh wilayah Indonesia.

RIPPN sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, harus digunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara dan/atau swasta mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan RIPPN.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

